



## Pengorganisasian Anggaran Dalam Pengelolaan Dana Operasional Sekolah Pendampingan Di SMKN 2 Kuripan Lombok Barat

Suwardi<sup>1\*</sup>, Sudirman<sup>1</sup>, Fahrudin<sup>1</sup>, Asrin<sup>1</sup>, Muhammad Makki<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Magister Administrasi Pendidikan, Pascasarjana, Universitas Mataram, Indonesia.

DOI: [10.29303/jpap.v7i2.515](https://doi.org/10.29303/jpap.v7i2.515)

Sitasi: Suwardi, S., Sudirman, S., Fahrudin, F., Asrin, A., & Makki, M. (2023). Pengorganisasian Anggaran Dalam Pengelolaan Dana Operasional Sekolah Pendampingan Di SMKN 2 Kuripan Lombok Barat. *JPAP (Jurnal Praktisi Administrasi Pendidikan)*, 7(2), 60–63.  
<https://doi.org/10.29303/jpap.v7i2.515>

### \*Corresponding Author:

Suwardi, Program Studi  
Magister Administrasi  
Pendidikan, Pascasarjana,  
Universitas Mataram, Indonesia  
Email: [dhilaardhi@gmail.com](mailto:dhilaardhi@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengorganisasian anggaran dalam pengelolaan dana operasional Sekolah di SMKN 2 Kuripan Lombok Barat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan deskriptif metode. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen, observasi dan wawancara. Hasil penelitian menemukan bahwa pengorganisasian anggaran dalam pengelolaan dana operasional sekolah pendampingan di SMKN 2 Kuripan dilakukan dengan membentuk tim manajemen yang terdiri dari unsur guru, unsur Tata Usaha dan komite sekolah. Pembentukannya melalui mekanisme yang ada yaitu rapat. Dalam proses ini kepala sekolah menetapkan tim yang sudah ada dan sama dengan tahun sebelumnya. Disamping bendahara dana BOS ada juga bendahara barang yang bertugas mencatat barang modal dan barang jasa yang dilaporkan ke Dinas dan Operator Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) yang membantu bendahara dalam proses pembuatan laporan *online* maupun *offline*. Ada beberapa kendala Timbul kecemburuan di antara personil yang yang tidak dipilih menjadi keanggotaan tim, Kurang mahir sumber daya manusia dalam mengoperasikan komputer dan aplikasi *Microsoft Office* dan tidak ada honor untuk bendahara dana BOS.

**Kata Kunci:** Pengorganisasian, Bantuan Operasional Sekolah, SMK.

## Pendahuluan

Dana Program Bantuan Operasional Sekolah (Dikenal dengan BOS) sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2017 membebaskan Masyarakat dari dana beban pendidikan (Tamburaka et al., 2021). Program BOS juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas belajar, mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal pada satuan pendidikan dan untuk mmake itu terjadi pencapaian Standar Nasional Pendidikan (kwown dengan SNP) pada pendidikan satuan (R. Hidayat et al. 2019). Dana sekolah bersumber dari BOS, Biaya Penyelenggaraan Pendidikan, Dana Alokasi Khusus dan pemerintah lainnya bantuan (Gunawan et al., 2021).

Dana Sekolah diperlukan untuk mendukung kegiatan yang ada di sekolah, kegiatan tersebut meliputi kegiatan evaluasi pembelajaran, kegiatan

ekstrakurikuler, pemenuhan fasilitas dan prasarana, kegiatan belajar-mengajar, pelatihan, praktik kerja industri dan lainnya kegiatan yang mendukung kemajuan sekolah. Melihat dari pentingnya anggaran, dapat dikatakan bahwa tujuan pendidikan akan tercapai, salah satunya yaitu jika sekolah atau lembaga pendidikan tersebut mampu mengelola anggaran pendidikan secara efektif dan efisien (Idris, 2020). Maka untuk mencapai hal tersebut, diperlukan pengelolaan keuangan yang baik.

Dana BOS sendiri merupakan program pemerintah yang diluncurkan pada tahun 2005, ditujukan untuk semua tingkatan SD, SMP, SMA, SMK sekolah baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun sektor swasta dengan mengacu pada data di dapodik (F. Hidayat & Tolla, 2022). Mekanismenya penyaluran dana BOS dilakukan oleh pemerintah dengan transfer langsung ke rekening sekolah, selain itu juga dilakukan melalui transfer ke kas daerah kemudian

ke masing-masing perbendaharaan sekolah. (F. Hidayat & Tolla, 2022). Untuk pencairan dana yang dilakukan oleh sekolah kepada bank, dianjurkan untuk dilakukan pada sistem triwulanan dan bertahap. Yang berbeda mekanisme penyaluran dana BOS tentunya berdampak pada pengelolaan keuangan Dana BOS di sekolah penerima, misalnya, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban adalah tidak tepat waktu.

Program dana BOS dapat memberikan sama kesempatan untuk semua siswa dan pendidikan lembaga untuk meningkatkan murah, terjangkau dan layanan pendidikan yang berkualitas (Rasminto et al., 2018). Selain itu, juga dapat mencegah putus sekolah sekolah untuk siswa miskin karena alasan tidak mampu membayar uang sekolah dan sekolah biaya kegiatan ekstrakurikuler dan sebagian besar yang penting program BOS bisa mendorong dan memotivasi pemerintah daerah dan masyarakat yang mampu memberikan Operasional Bantuan untuk sekolah (Lopulalan, 2020).

Secara umum dalam proses Manajemen BOS dana perlu memperhatikan beberapa prinsip. Permendikbud No. 6 Tahun 2021 menjelaskan bahwa pengelolaan dana pendidikan didasarkan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, fleksibilitas, efektivitas dan efisiensi penekanan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pada aspek akuntabilitas, transparansi dan fleksibilitas. Transparansi disektor keuangan, itu artinya ada keterbukaan dalam pengelolaan dana di sekolah atau lembaga pendidikan, baik itu jumlah dana dan pertanggungjawabannya. Akuntabilitas Dalam manajemen, artinya penggunaan biaya sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan akuntabilitas adalah dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah. Fleksibilitas berarti bahwa penggunaan dana bisa dibuat sesuai kebutuhan masing-masing sekolah (Alumudy, 2018).

Dari hasil wawancara dengan terkait komponen dan hasil observasi awal yang dibuat oleh peneliti tentang manajemen SMK Negeri 2 Kuripan memperoleh informasi bahwa proses pengelolaan dana BOS telah dilakukan secara prosedural, hal ini dapat dibuktikan dengan Alokasi dana dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah berdasarkan skala prioritas yang mengacu pada komponen penggunaan Operasional Sekolah Dana Bantuan (Permendikbud No. 6 Tahun 2021) dan delapan standar nasional pendidikan, sebagai dijelaskan dalam ringkasan rencana kegiatan sekolah dan anggaran SMK Negeri 2 Kuripan tahun 2021 dengan 1475 mahasiswa dan total anggaran sebesar Rp. 2.374.750.000.

Proses pengorganisasian pada manajemen dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah

memberdayakan sumber daya yang ada dalam manajemen itu, merumuskan dan membuat tugas serta patokan standar yang diperlukan. Kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya kerja adalah bagian dari aktivitas pengorganisasian. Ini dilakukan supaya manajemen dapat berjalan maksimal dan sempurna. Sebelum penggunaan dan pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Manajemen sekolah melakukan sosialisasi kepada seluruh *stakeholder* yang ada di sekolah. Dan membentuk tim manajemen yang mengurus penggunaan dana BOS selama 1 tahun anggaran. Hal ini dilakukan supaya semua kegiatan dan program sekolah yang dibiayai oleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat berjalan optimal. Dalam penunjukan sumber daya yang berperan sebagai tim manajemen lebih lagi sebagai bendahara kepala sekolah mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya itu sebagai bagian yang dibutuhkan dalam suatu lembaga itu. Contohnya dalam memilih sumber daya yang mempunyai tugas sebagai bendahara maka harus memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer atau laptop, kemudian menguasai *Microsoft Office* dan paham pembukuan keuangan.

Berdasarkan deskripsi yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di SMK Negeri 2 Kuripan untuk mengetahui bagaimana proses pengorganisasian dana BOS di SMK Negeri 2 Kuripan didasarkan pada prinsip pengelolaan dana BOS dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, dimana hasil identifikasi awal manajemen proses berjalan dengan baik meskipun ada beberapa masalah dalam pengelolaan dana BOS. Tujuannya studi adalah untuk rencana anggaran dalam pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 2 Kuripan, Barat Kabupaten Lombok.

## Metode

Penelitian dilakukan di SMKN 2 Kuripan, Kecamatan Kuripan, Lombok Barat Kabupaten, Nusa Tenggara Barat. Penelitian Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan kasus desain penelitian. Data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer, yaitu data didapat dari wawancara langsung (Sugiyono (2019). Bentuk dari data merupakan hasil wawancara mengenai pengelolaan dana BOS, dari sebelum menerima dana untuk proses pembelanjaan dan pelaporan atas penggunaan dana tersebut. Sumber dalam penelitian ini termasuk kepala sekolah, Kasubbag Tata Usaha, Bendahara, Guru, dan Komite Sekolah. Data sekunder, yaitu data diperoleh dari data yang ada dan memiliki hubungan dengan

masalah yang sedang dipelajari. Bentuk dari data isteaching data staf, data siswa, sekolah data infrastruktur, Rencana Kegiatan Sekolah dan Anggaran dan laporan singkat penggunaan BOS. Data sekunder juga dapat diperoleh dari internet data situs, dokumentasi resmi dan media massa Teknik pengumpulan data secara kualitatif penelitian terdiri dari: observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data BOS pengelolaan data di SMKN 2 Kuripan dan Sub bagian PSMK Dinas Pendidikan Provinsi NTB yang meliputi pencatatan data, pendataan organisasi, perincian data di unit-unit tertentu, mensintesis data, memeriksa pola, menentukan apakah data dianggap penting dan memutuskan apakah data yang diperoleh sebagai laporan adalah diperlukan.

## Hasil dan Pembahasan

Pengorganisasian menurut Permendikbud No.6 Tahun 2021 adalah Membentuk tim BOS Sekolah yang terdiri atas penanggungjawab, bendahara dan anggota dimana unsur itu atas unsur guru, unsur Komite Sekolah dan unsur orang tua/wali peserta didik di luar Komite Sekolah, yang dipilih oleh kepala sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitas dan tidak memiliki konflik kepentingan.

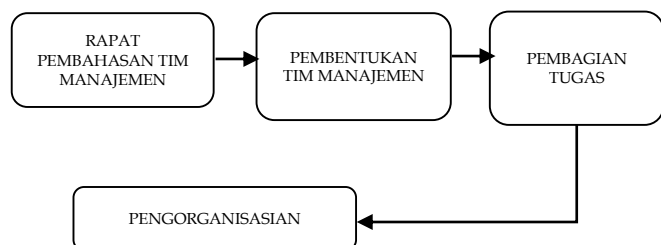
Proses pengorganisasian di SMKN 2 Kuripan dilaksanakan dengan cara membentuk tim manajemen dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dikombinasikan menggunakan prinsip-prinsip tranfaransi, akuntabilitas dan fleksibilitas, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Mengadakan pertemuan untuk menentukan pelaksana dana Bantuan Operasioal Sekolah (BOS). Rapat oleh tim manajemen sekolah untuk memilih tim manajemen dana BOS. Tim dipilih dari unsur Guru, Tata Usaha dan Komite sekolah, pembagiannya terdiri dari penanggungjawab, ketua kegiatan, sekretaris, bendahara dan anggota.
2. Membentuk Tim Manajemen yang dibuktikan dengan surat keputusan Kepala Sekolah berfungsi untuk mengorganisir kegiatan tersebut. Tim itu terdiri dari penangung jawab, ketua, Bendahara dan anggota. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab harus mampu memanejemen tim, harus memahami konsep, alur dan prinsip-prinsip keuangan serta memahami peraturan-peraturan yang berlaku kaitannya dengan dana BOS. Ketua tim dipilih dari salah satu guru yang mumpuni mampu menguasai Microsoft Office dan memahami prinsip-prinsip keuangan dana BOS serta memiliki integritas yang tinggi dalam mengorganisir dana BOS. Bendahara

harus mampu membuat pelaoran yang kompatibel dan transparan sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan mampu menguasai aplikasi ARKAS dan Office. Kepala Tata Usaha yang berperan sebagai pengawas/PPK di sekolah harus mampu mengawasi jalannya pengelolaan dana BOS supaya efektif dan efisien. Dalam melaksanakan kegiatan manajemen keuangan ini pihak sekolah juga dibantu oleh seorang bendahara barang dan seorang operator, dimana fungsi dari bendahara barang ini adalah untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran barang dari hasil pembelian dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sedangkan operator berperan dalam menginput Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) manual ke Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) serta membantu dalam membuat pelaporan baik offline maupun online. Bendahara dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun bendahara barang adalah sama-sama di berikan surat keputusan (SK) oleh gubernur atas rekomendasi dari sekolah. Khusus untuk bendahara keuangannya diutamakan adalah seorang abdi negara terlebih lagi adalah sebagai staff administrasi bukan guru atau tenaga pendidik karena setelah dari tim ini terpilih maka selanjutnya bendaharawan akan diusulkan ke dinas dikbud provinsi untuk diberikan Surat Keputusan dari Gubernur Nusa Tenggara Barat. Rapat dilakukan untuk meminimalisir loss control dalam pemberdayaan sumber daya yang ada dan tentu yang terpilih adalah orang-orang yang kompeten dalam bidangnya.

3. Mengoptimalkan peran bendahara yang didukung oleh operator dapodik dan operator Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS). Dalam melaksanakan kegiatan manajemen dana BOS pihak sekolah dibantu oleh seorang bendaharawan barang, yang fungsinya adalah untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran barang dari hasil pembelian dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pemilihan anggota tim tidak sepenuhnya baik karena tim anggota tim yang dipilih itu sama dengan tim yang digunakan tahun sebelumnya, kegiatan rapat hanya sebagai penetapan tim yang ada sebelumnya. Ini dilakukan karena pengelolaan dana BOS tidak terpusat pada pengelolaan uang/dana saja tetapi juga terkait barang dan alat yang dibeli, harus dipelihara dan dilaporkan ke dinas.

Dari penjelasan mengenai langkah-langkah pengorganisasian di atas, dapat dibuatkan diagramnya sebagai berikut:



Berbagai berbagai kendala yang dihadapi dalam organisasi perorganisasian ini adalah sebagai berikut:

1. Timbul kecemburuan di antara personil yang yang tidak dipilih menjadi keanggotaan tim mereka berpikir dengan menjadi sebuah tim manajemen keuangan penghasilannya akan meningkat dan tentu akan menjurus kepada kesejahteraan yang meningkat.
2. Kurang mahir sumber daya manusia dalam mengoperasikan komputer dan aplikasi *Microsoft Office* dapat menjadi hambatan dalam membuat penyusunan dan pelaporan anggaran. Dalam menghadapi sumber daya manusia yang kurang dalam aplikasi komputer maka kepala sekolah meminta sumber daya manusia tersebut dibantu oleh operator.
3. Tidak terdapatnya aturan yang memberikan hak tim yaitu honor sehingga menyebabkan tim merasa enggan untuk menjabat melaksanakan tugas itu. Kedepan ini dapat menjadi masukan bagi pemangku kepentingan untuk memasukkan aturan tentang honor tim dalam juknis/peraturan menteri.

Secara umum proses pengorganisasian yang dilakukan oleh SMKN 2 Kuripan mengikuti prosedur dan prinsip yang ada pada Permendikbud No.6 Tahun 2021, akan tetapi sebagian besar anggota tim manajemen tahun 2021 sama dengan tim tahun sebelumnya, ini dapat dikatakan prinsip akuntabelnya masih kurang

### Kesimpulan

Proses pengorganisasian dilakukan dengan membentuk tim manajemen yang terdiri dari unsur guru, unsur Tata Usaha dan komite sekolah. Pembentukannya melalui mekanisme yang ada yaitu rapat. Dalam proses ini kepala sekolah menetapkan tim yang sudah ada dan sama dengan tahun sebelumnya. Disamping bendahara dana BOS ada juga bendahara barang yang bertugas mencatat barang modal dan barang jasa yang dilaporkan ke Dinas dan Operator Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) yang membantu bendahara dalam proses

pembuatan laporan *online* maupun *offline*. Ada beberapa kendala Timbul kecemburuan di antara personil yang yang tidak dipilih menjadi keanggotaan tim, Kurang mahir sumber daya manusia dalam mengoperasikan komputer dan aplikasi *Microsoft Office* dan tidak ada honor untuk bendahara dana BOS.

### Daftar Pustaka

Alumudy, W. G. (2018). Analisis Pencatatan Akuntansi Pada Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)(Studi Kasus Di SMK Negeri 1 Lunnyuk). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 3(2).

Gunawan, I. G. H., Sumada, I. M. ., & Suargita, I. N. (2021). Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar No 1 Blahkiuh Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. *Widyanata*, 18(1), 21–29

Hidayat, R., Burhan, M. R., & Al Ma’ruf, A. M. (2019). Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Pendidikan (Studi di SDN 44 Mande Kota Bima). *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 7(2), 93.

Hidayat, F., & Tolla, I. (2022). Transparansi dan akuntabilitas Penggunaan dana BOS, Vol 3, No.1

Idris, I. (2020). Perencanaan pendidikan dalam konteks desentralisasi pendidikan: *Journal of Pedagogy*, 3(2).

Kemendikbud. (2021). Permendikbud No.6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS. Jakarta: Kemendikbud.

Lopulalan, J. E. (2020). Analisis Pengawasan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Di SD YPK Ebenhaezer Limanas Kabupaten Raja Ampat. *Jurnal Jendela Ilmu*, 1(1), 23–28

Tamburaka, S., Yusuf, S., Ilyas, M. (2012). Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) (Studi Kasus Pada Sekolah Dasar Negeri Labotoy Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)* Volume 6, No. 1 Februari Tahun 2021 Page: 337 – 351.

Rasminto, H., & Kuncoro, A. A. (2018). Perancangan Sistem Informasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Terpadu Dengan Metode Berorientasi Objek. In *Prosiding Seminar Nasional & Internasional* (Vol. 1, No. 1).

Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.